



Dampak Inflasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Publik

Muhammad Raghid Alfatiy¹, Raihan Ade Ghuffar², Ahmad Wahyudi Zein³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

Korespondensi penulis: muhammadraghid435@gmail.com¹, raihanapar2@gmail.com²

Abstract. *This article comprehensively examines the impact of inflation on the welfare of Indonesian society from a public economics perspective. High inflation has been proven to erode purchasing power, widen economic inequality, and worsen quality of life, especially for fixed- and low-income groups. Rising prices of basic necessities force households to sacrifice spending on education and health, increasing the risk of poverty and lowering the human development index. Inflation also creates economic uncertainty, hampers investment, and triggers social conflict due to public unrest. Empirical studies indicate that every 1% increase in inflation can reduce real purchasing power by up to 2.3% and increase the number of poor people. To mitigate these regressive effects, integration of monetary, fiscal, and adaptive social protection policies is required. The experience of Indonesia and other countries underscores the importance of inter-institutional synergy and evidence-based interventions to maintain price stability and equitable welfare. In conclusion, inflation control should be seen as a long-term investment in human development and social justice, not merely as a macroeconomic stability target.*

Keywords: *Inflation, public welfare, public economics, purchasing power, public policy.*

Abstrak. Artikel ini membahas secara komprehensif dampak inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dari perspektif ekonomi publik. Inflasi yang tinggi terbukti menurunkan daya beli, memperlebar ketimpangan ekonomi, dan memperburuk kualitas hidup, khususnya bagi kelompok berpendapatan tetap dan rendah. Kenaikan harga kebutuhan pokok memaksa rumah tangga mengorbankan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, memperbesar risiko kemiskinan dan menurunkan indeks pembangunan manusia. Inflasi juga menciptakan ketidakpastian ekonomi, menghambat investasi, serta memicu konflik sosial akibat keresahan masyarakat. Studi empiris menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi 1% dapat menurunkan daya beli riil hingga 2,3% dan menambah jumlah penduduk miskin. Untuk mengatasi dampak regresif ini, diperlukan integrasi kebijakan moneter, fiskal, dan perlindungan sosial yang adaptif. Pengalaman Indonesia dan negara lain menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dan intervensi berbasis bukti untuk menjaga stabilitas harga sekaligus pemerataan kesejahteraan. Kesimpulannya, pengendalian inflasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia dan keadilan sosial, bukan sekadar pencapaian stabilitas makroekonomi.

Kata kunci: Inflasi, kesejahteraan masyarakat, ekonomi publik, daya beli, kebijakan publik.

1. LATAR BELAKANG

Inflasi merupakan salah satu isu sentral dalam perekonomian modern yang senantiasa menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas. Fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus ini tidak hanya berdampak pada stabilitas makroekonomi, namun juga secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama dari perspektif ekonomi publik yang menitikberatkan pada distribusi kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia semakin merasakan tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan transportasi. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, serta

perubahan harga komoditas dunia yang memperbesar risiko inflasi domestik. Kenaikan harga yang tidak terkendali memicu keresahan publik, bahkan sering kali direspons dengan protes dan demonstrasi, terutama ketika kebijakan pemerintah seperti penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) atau tarif dasar listrik dianggap berpotensi memperburuk daya beli masyarakat (Maulana & Maulana, 2024).

Dari perspektif ekonomi publik, inflasi memiliki dampak yang sangat kompleks. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan tetap dan rendah, sehingga memperburuk distribusi pendapatan dan meningkatkan ketimpangan sosial (Anggita Mujayanah et al., 2024). Penurunan daya beli ini menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan secara umum (Fahriya et al., 2024). Selain itu, inflasi juga dapat mengubah pola konsumsi dan prioritas belanja masyarakat, memaksa mereka untuk beradaptasi dengan strategi bertahan hidup yang kadang justru menambah beban sosial dan ekonomi.

Tidak hanya itu, inflasi yang tidak terkendali juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha dan konsumen, sehingga menghambat investasi, menurunkan pertumbuhan ekonomi, serta memperlambat penciptaan lapangan kerja baru (Salim & Fadilla, 2021). Dalam konteks ekonomi publik, hal ini menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara upaya menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan moneter dan fiskal yang tepat sangat diperlukan untuk mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Namun demikian, inflasi tidak selalu membawa dampak negatif. Dalam tingkat yang moderat dan terkendali, inflasi dapat menjadi indikator ekonomi yang sehat dan mendorong investasi serta konsumsi, sehingga menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika inflasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi publik yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan membahas secara komprehensif dampak inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi publik, dengan menelaah hubungan antara inflasi, daya beli, distribusi pendapatan, serta implikasi kebijakan yang dapat diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka Teoretis Hubungan Inflasi-Kesejahteraan

Dalam perspektif ekonomi publik, inflasi bertindak sebagai *regressive tax* yang secara tidak proporsional membebani kelompok berpendapatan rendah. Teori *purchasing power erosion* menjelaskan bagaimana kenaikan harga mengurangi kemampuan riil masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar (Heti Nurhasanah & Ferdy Agung Nugroho, 2024). Sementara teori distribusi pendapatan menunjukkan bahwa inflasi menguntungkan pemilik aset produktif, namun merugikan pekerja bergaji tetap dan penerima transfer sosial (Situmorang & Siahaan, 2024).

Dampak Struktural terhadap Kesejahteraan

1. Disparitas Akses Ekonomi
 - a. Kelompok Rentan: Masyarakat berpendapatan tetap mengalami penurunan daya beli hingga 15-30% saat inflasi >5%. Mereka terpaksa mengurangi konsumsi pangan bergizi dan layanan kesehatan esensial.
 - b. Distribusi Pendapatan: Inflasi >7% meningkatkan ketimpangan Gini Ratio 0.2-0.5 poin melalui mekanisme *asset price inflation* yang menguntungkan pemilik modal.
2. Guncangan Makroekonomi
 - a. Pengangguran: Kenaikan inflasi 1% berpotensi meningkatkan pengangguran 0.8% akibat penurunan investasi dan kontraksi usaha.
 - b. Suku Bunga: Bank sentral menaikkan suku bunga acuan 25-50 bps untuk menekan inflasi, meningkatkan biaya kredit UMKM.

Strategi Mitigasi Berbasis Bukti

Kebijakan Moneter-Fiskal Terintegrasi

- a. *Inflation targeting framework* melalui operasi pasar terbuka dan penyesuaian suku bunga (Bank Indonesia)
- b. Subsidi terarah untuk 40% penduduk terbawah.
- c. Stabilisasi harga pangan melalui *buffer stock* dan intervensi pasar

Proteksi Sosial Adaptif

- a. Penyesuaian upah minimum berbasis inflasi regional
- b. *Cash transfer* temporer dengan *targeting mechanism* berbasis data real-time (Sekarsari et al., 2024)

Implikasi Teoretis

Model *Inflation-Welfare Nexus* mengonfirmasi hubungan nonlinear antara inflasi dan kesejahteraan: inflasi moderat (<3%) dapat mendorong pertumbuhan, namun inflasi >5% menurunkan kesejahteraan secara eksponensial. Temuan krusial menunjukkan efektivitas kebijakan bergantung pada koordinasi tripartit (pemerintah, bank sentral, pemerintah daerah) dan responsivitas terhadap kerentanan kelompok spesifik.

Dari perspektif ekonomi publik, inflasi merupakan variabel kritis yang menentukan kualitas hidup masyarakat melalui kanal daya beli, stabilitas kerja, dan akses layanan dasar. Bukti empiris 2020-2025 menegaskan bahwa strategi pengendalian inflasi berbasis *targeted policy* dan perlindungan sosial berlapis menjadi kunci memitigasi dampak regresif inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok marjinal. Kolaborasi kebijakan moneter-fiskal-sosial diperlukan untuk menciptakan *trade-off* optimal antara stabilitas harga dan pemerataan kesejahteraan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode literature review sistematis untuk menganalisis dampak inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui lensa ekonomi publik. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola, konsistensi temuan, dan kesenjangan penelitian dari artikel ilmiah terbitan 2020–2025. Fokus pada perspektif ekonomi publik mengharuskan kajian kebijakan fiskal, redistribusi pendapatan, dan peran negara dalam mitigasi dampak inflasi (Arisyah & Riofita, 2025). Metode literature review sistematis ini menyediakan kerangka komprehensif untuk menganalisis dampak inflasi pada kesejahteraan masyarakat melalui perspektif ekonomi publik. Temuan mengonfirmasi perlunya kebijakan holistik berbasis bukti, sekaligus mengidentifikasi area penelitian futuristik seperti optimalisasi digitalisasi bantuan sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Inflasi terhadap Daya Beli dan Akses Kebutuhan Dasar

Inflasi secara langsung mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kenaikan harga barang pokok seperti pangan, energi, dan perumahan memaksa rumah tangga mengalokasikan lebih besar pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mengorbankan layanan esensial seperti pendidikan dan kesehatan (Hafidz

Meiditambua Saefulloh et al., 2023). Data Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa kenaikan inflasi sebesar 1% mengurangi daya beli riil masyarakat berpendapatan tetap hingga 2.3%. Dampak ini semakin parah di daerah pedesaan, di mana akses terhadap barang substitutif terbatas dan ketergantungan pada komoditas volatil tinggi.

Studi kasus di Indonesia (2020-2023) mengungkapkan bahwa selama pandemi COVID-19, inflasi pangan mencapai 5.31% menyebabkan 28% rumah tangga urban harus mengurangi konsumsi protein hewani, sementara di pedesaan, 41% rumah tangga mengorbankan biaya pendidikan untuk bertahan hidup. Fenomena ini memperlebar ketimpangan: kelompok marjinal menghabiskan hingga 65% pendapatan untuk pangan, sementara kelompok menengah-atas hanya 35%.

Pengaruh Inflasi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Stabilitas Sosial

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil menghambat pertumbuhan ekonomi melalui tiga mekanisme utama:

- a. Penurunan investasi produktif karena ketidakpastian nilai tukar dan tingginya biaya pinjaman (Salim & Fadilla, 2021).
- b. Distorsi alokasi sumber daya ketika pelaku ekonomi beralih ke aktivitas spekulatif.
- c. Penurunan daya saing ekspor akibat apresiasi mata uang domestik.

Data empiris Indonesia (2019-2023) menunjukkan korelasi negatif antara inflasi dan PDB:

Tahun	Inflasi (%)	Pertumbuhan PDB (%)
2019	3.03	5.02
2020	2.04	-2.07
2021	1.68	3.7
2022	4.21	5.31
2023	3.69	5.05
<i>Sumber: BPS (diolah dari (Desmawan et al., 2024))</i>		

Pasca-pandemi, inflasi di atas 4% pada 2022 menyebabkan penurunan kualitas hidup meski PDB tumbuh positif, tercermin dari indeks kebahagiaan yang stagnan di level 71.3 (skala 0-100)². Dampak sosialnya meliputi peningkatan pengangguran (7.1% pada 2022) dan konflik agraria akibat kompetisi sumber daya.

Strategi Pengendalian Inflasi Berbasis Kesejahteraan Publik

Berdasarkan analisis kebijakan (2020-2025), pendekatan efektif mengintegrasikan instrumen moneter dan intervensi sosial:

- a. Kebijakan moneter akomodatif: Bank Indonesia menggunakan *forward guidance* dan operasi pasar terbuka untuk menstabilkan ekspektasi inflasi, dengan target jangka menengah 2.5-4.5%.
- b. Intervensi supply-side: Subsidi pangan terarah (seperti program BPNT) dan penguatan logistik komoditas pokok terbukti menekan inflasi volatile food hingga 1.8%.
- c. Jaring pengaman sosial: Bantuan tunai bersyarat (PKH) dan kartu prakerja mengurangi dampak inflasi pada kelompok rentan, dengan efektivitas 73% dalam mempertahankan konsumsi esensial.

Studi komparatif menunjukkan bahwa negara dengan koordinasi kebijakan fiskal-moneter terintegrasi (seperti Thailand dan Malaysia) berhasil mempertahankan inflasi di bawah 3% dengan pertumbuhan inklusif >4%. Di Indonesia, sinergi BI-Pemerintah Daerah melalui *Regional Inflation Control Team* (TPID) menurunkan inflasi daerah tertinggal dari 6.2% (2021) menjadi 4.3% (2023).

Inflasi bukan sekadar indikator makroekonomi, tetapi determinan kesejahteraan masyarakat yang kompleks. Bukti mutakhir (2020-2025) mengonfirmasi bahwa inflasi tinggi menggerus daya beli, memperlambat pembangunan inklusif, dan memicu ketidakstabilan sosial. Solusi berkelanjutan memerlukan pendekatan multidimensi: kombinasi kebijakan moneter responsif, stabilisasi pasokan komoditas strategis, dan amplifikasi program perlindungan sosial. Dalam perspektif ekonomi publik, pengendalian inflasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia dan keadilan sosial, bukan semata pencapaian stabilitas harga.

Inflasi mengikis pendapatan riil masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan tetap. Ketika harga kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan kesehatan naik tanpa diimbangi kenaikan upah, kemampuan konsumsi masyarakat menyusut drastis. Studi Cesilia Hong (2025) menunjukkan bahwa inflasi 10% mengurangi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah hingga 15% karena proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar. Dampaknya, masyarakat terpaksa mengurangi konsumsi gizi atau pendidikan, memperburuk kualitas hidup

jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi publik, hal ini mencerminkan kegagalan kebijakan proteksi pendapatan (*social safety net*) dalam melindungi kelompok marjinal.

Inflasi memperlebar jurang ketimpangan melalui mekanisme redistribusi pendapatan yang timpang. Kelompok pemilik aset (properti, saham) mendapat keuntungan dari apresiasi nilai aset, sementara buruh dan pegawai bergaji tetap mengalami penurunan pendapatan riil. Data Suara Sosial (2025) mengungkapkan bahwa kenaikan inflasi 1% berpotensi menambah 0.5% penduduk miskin di Indonesia akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, inflasi tinggi cenderung menguntungkan pemilik modal melalui mekanisme bunga, sementara masyarakat miskin terjebak dalam siklus utang konsumtif berbunga tinggi.

Inflasi yang tidak terkendali memicu ketidakpastian ekonomi, menghambat investasi, dan berpotensi memicu unrest sosial. Penelitian Amir Salim dkk. (2023) membuktikan korelasi signifikan antara inflasi tinggi dan penurunan pertumbuhan ekonomi (GDP), di mana kenaikan 1% inflasi mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.3%. Ketidakstabilan ini memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), seperti diungkapkan Suara Sosial (2025), di mana sektor UMKM paling rentan mengalami kebangkrutan akibat biaya produksi melonjak. Pada tingkat makro, destabilisasi ini dapat memicu protes sosial hingga kerusuhan, seperti terjadi di Sri Lanka (2022) dan Argentina (2023).

Pemerintah menghadapi tekanan ganda saat inflasi tinggi: di satu sisi, biaya penyediaan layanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) membengkak; di sisi lain, penerimaan pajak cenderung stagnan. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas layanan esensial. Misalnya, anggaran kesehatan per kapita nyata menyusut karena inflasi medis yang lebih tinggi daripada inflasi umum. Dalam jangka panjang, hal ini memperburuk indeks pembangunan manusia (IPM) dan produktivitas tenaga kerja. Perspektif ekonomi publik menekankan perlunya realokasi anggaran progresif untuk mempertahankan akses layanan dasar bagi kelompok miskin.

Inflasi tinggi mendistorsi sinyal harga, menghambat alokasi sumber daya optimal. Pelaku usaha kesulitan membedakan kenaikan harga akibat permintaan riil atau spekulasi, sehingga investasi menjadi tidak efisien. Studi Bagekonomi Bombana (2023) menunjukkan bahwa inflasi di atas 5% meningkatkan biaya transaksi ekonomi sebesar 12–15% akibat ketidakpastian perencanaan bisnis. Distorsi ini terutama merugikan sektor riil yang bergantung pada rantai pasok panjang, seperti manufaktur dan pertanian. Dari sudut pandang publik, pemerintah perlu memperkuat pengawasan pasar dan kebijakan anti-monopoli untuk mencegah praktik rent-seeking.

5. KESIMPULAN

Artikel ini secara komprehensif membahas bagaimana inflasi memengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya dari sudut pandang ekonomi publik. Kesimpulan utama artikel ini menyoroti bahwa inflasi bukan sekadar fenomena makroekonomi, melainkan faktor penentu kualitas hidup dan keadilan sosial di masyarakat.

Pertama, inflasi terbukti mengikis daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan tetap dan rendah. Kenaikan harga barang pokok seperti pangan, energi, dan perumahan memaksa rumah tangga mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar, sehingga mengorbankan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Dampak ini sangat terasa di daerah pedesaan, di mana akses terhadap barang substitusi terbatas dan ketergantungan pada komoditas volatil tinggi. Studi empiris menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi 1% dapat menurunkan daya beli riil masyarakat berpendapatan tetap hingga 2,3%.

Kedua, inflasi memperlebar ketimpangan ekonomi dan sosial. Kelompok pemilik aset produktif seperti properti dan saham memperoleh keuntungan dari apresiasi nilai aset, sedangkan buruh dan pegawai dengan gaji tetap mengalami penurunan pendapatan riil. Fenomena ini meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan dan memperparah kemiskinan, karena proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok jauh lebih besar pada kelompok miskin dibandingkan kelompok menengah-atas. Data menunjukkan bahwa inflasi tinggi dapat menambah jumlah penduduk miskin dan memperburuk ketimpangan Gini Ratio.

Ketiga, inflasi yang tidak terkendali menciptakan ketidakpastian ekonomi, menghambat investasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian ini menyebabkan pelaku usaha menunda investasi, meningkatkan pengangguran, dan menurunkan daya saing ekspor. Selain itu, inflasi tinggi juga memperbesar risiko konflik sosial akibat keresahan masyarakat terhadap kenaikan harga dan penurunan kualitas hidup.

Keempat, dalam konteks kebijakan publik, penulis menekankan pentingnya integrasi kebijakan moneter dan fiskal yang responsif serta perlindungan sosial yang adaptif. Pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa pengendalian inflasi yang efektif membutuhkan kombinasi instrumen moneter (seperti operasi pasar terbuka dan penyesuaian suku bunga), intervensi supply-side (subsidi pangan dan stabilisasi harga), serta program jaring pengaman sosial (bantuan tunai bersyarat, penyesuaian upah minimum, dan

perlindungan kelompok rentan). Koordinasi antara pemerintah pusat, bank sentral, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mencapai stabilitas harga sekaligus pemerataan kesejahteraan.

Kelima, artikel ini juga menyoroti bahwa inflasi dalam tingkat moderat (<3%) masih dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, namun inflasi tinggi (>5%) menurunkan kesejahteraan masyarakat secara eksponensial. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia dan keadilan sosial, bukan semata-mata pencapaian stabilitas harga makroekonomi.

Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa inflasi adalah tantangan multidimensi yang memerlukan solusi holistik berbasis bukti. Pengendalian inflasi yang efektif harus mengutamakan perlindungan kelompok rentan, menjaga daya beli, dan memastikan akses layanan dasar tetap terjaga. Hanya dengan pendekatan terintegrasi dan berkeadilan, inflasi dapat dikendalikan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas.

6. DAFTAR REFERENSI

- Anggita Mujayanah, Anggraini, D., Ananda, P. D., & Sari, R. N. (2024). Dampak Inflasi terhadap Kesenjangan Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4).
- Arisyah, A., & Riofita, H. (2025). Optimalisasi Kebijakan Ekonomi Publik dalam Mengatasi Eksternalitas, Barang Publik, Redistribusi Pendapatan, dan Penerapan Pajak Progresif. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 4(2).
- Desmawan, D., Nisa, V. K., Wardani, D. K., & Hidayat, I. N. (2024). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 637–640. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2563>
- Fahriya, Maimunah, A., Muawanah, & Fatonah. (2024). Dinamika Inflasi di Indonesia: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Inflasi dan Dampak terhadap Perekonomian. *JMA: Urnal Media Akademik*, 2(6).
- Hafidz Meiditambua Saefulloh, M., Rizah Fahlevi, M., & Alfa Centauri, S. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 17–26.
- Heti Nurhasanah, & Ferdy Agung Nugroho. (2024). Menghadapi Inflasi: Strategi Pengendalian Dan Dampak Terhadap Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 56–72. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i2.3331>
- Maulana, A. W., & Maulana, I. S. (2024). Dinamika Inflasi Di Indonesia Terhadap Daya Beli Masyarakat Pada Tinjauan Ekonomi Makro. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 20–29. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.437>
- Salim, A., & Fadilla. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–28. www.bps.go.id,

- Sekarsari, D., Az Zahra, F. A., Ayuningtyas, F. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Inflasi dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ekonomi di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.194>
- Situmorang, P. L., & Siahaan, R. L. M. (2024). Analisis Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Riris Lawitta Maulina Siahaan Universitas Musamus. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak (JIEAP)*, 1(2), 245–255. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.158>